



ANALISA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Redian Mulyadita¹

Dosen Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

E-mail: redianmulyadita@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability of the application of the Regional Financial Accounting System at the Regional Revenue Service of Kuantan Singingi Regency with Government Regulation Number 24 of 2005 concerning Government Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Regional Financial Management.

This research was conducted at the finance department of the Kuantan Singingi Regency Regional Revenue Service. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are direct interviews and documentation or photocopying of regional financial data at the Regional Revenue Service of Kuantan Singingi Regency. In the preparation of this research, the author uses a descriptive method, namely by comparing the practice with the existing theory, then draws a conclusion to be presented in the thesis.

From the results of this research it was concluded that the application of the regional financial accounting system at the Regional Revenue Service of Kuantan Singingi Regency did not fully refer to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Regional Financial Management.

Keywords : *Application of the Regional Financial Accounting System at the Regional Revenue Service.*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dan dokumentasi atau memfotocopy data keuangan daerah

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara praktek dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keywords : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan mempunyai kualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai karakteristik yang memadai, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. (Yuliani, Nadirsyah dan Bakar 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tingkat baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode.

Penerapan otonomi daerah telah membawa konsekuensi logis berupa pelaksana penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pemerintah yang sehat. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah direvisi menjadi Nomor 59 Tahun 2007. Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah melakukan Perubahan kedua dengan mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan akuntansi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman kepada undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan membuat Buku Kas Umum. Semua transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas Umum. Selain di Buku Kas umum, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga mencatat atau membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas dengan system terkomputerisasi, yaitu dengan cara menginput seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Kemudian proses selanjutnya yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi membuat Laporan Realisasi Anggaran, setelah itu proses akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah membuat Neraca.

Dari tahapan-tahapan siklus akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi di atas dapat diketahui beberapa permasalahan dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak melakukan penyusutan terhadap penyusutan aset tetap yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari Neraca tahun 2012 dan tahun 2013 nilainya nol (0,00)
2. Belum membuat jurnal penyesuaian, serta tidak melakukan pemostingan ke buku besar.

RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Simamora (2004:4) akuntansi adalah proses pengukuran aktivitas ekonomi suatu entitas dalam satuan uang dan mengkomunikasikan hasilnya kepada

pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses akuntansi terdiri dari dua kativitas utama yaitu: pengukuran dan pengkomunikasian.

2. Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

3. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan akuntansi keuangan daerah, *American Accounting Association* dalam buku Indra Bastian (2001:165) menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah yaitu :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksana tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan pengguna sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan pengguna dan penggunaan dana publik.

4. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim, (2012:44) mengatakan, Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

b. Dasar Pengakuan

Dasar pengakuan (*recognition*) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, (2012:5-55) dasar akuntansi terbagi empat yaitu :

1. Basis kas (*cash basis*)

Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang menagakuai transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis kas modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

3. METODE PENELITIAN

a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data Primer.

Data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden (Iskandar, 2008:252). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bagian keuangan mengenai proses penyusunan keuangan daerah, proses pengesahan keuangan daerah, proses pelaksanaan keuangan daerah, proses pengawasan keuangan daerah, serta proses pengesahan perhitungan keuangan daerah.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian) (Iskandar, 2008:253). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, struktur organisasi serta laporan keuangan.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan kemudian disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

4. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Sistem Penerimaan Kas

Sebelum penerimaan dana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pada bagian Bendahara Pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Badan selaku pengguna anggaran, kemudian kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SPT, SP2D, kwitansi, perincian dan kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan. Setelah ditandatangani, Bendahara Umum Daerah menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek tersebut dicairkan ke Bank Riau, uang yang didapat dimasukkan ke Kas. Atas transaksi tersebut oleh Pembantu Bendahara Penerimaan ke dalam Buku Kas Umum dan tidak membuat jurnalnya.

2. Sistem Pengeluaran Kas

Sedangkan untuk proses Pengeluaran Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimulai dari pimpinan pelaksana mengajukan permohonan dana, lalu atasan Bendahara pengeluaran memberikan persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana. Bendahara pengeluaran mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu mengeluarkan uang dari kas, kemudian dibukukan dan dibuatkan dokumen yaitu: SPD, SP2D, dan SPM sebagai bukti atas pengeluaran kas. Dokumen tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh atasan Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan. Secara keseluruhan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat jurnal atas transaksi yang terjadi.

B. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dikatakan bahwa setiap transaksi harus dijurnal dan kemudian diposting ke Buku Besar dan dibuat daftar saldo, selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian dan terakhir membuat laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diatas belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Adapun proses akuntansi keuangan daerah menurut Permandagri Nomor 13 Tahun 2006 yang seharusnya dilakukan oleh Sekretariat DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Transaksi di atas dibuat Jurnal sebagai berikut :

Sebenarnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini telah melakukan penjurnalan, baik itu jurnal penerimaan maupun jurnal pengeluaran kas dengan

system terkomputerisasi. Namun tidak melakukan print out sehingga proses penjurnalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi ini tidak dapat diketahui.

2. Posting ke Buku Besar

Setelah membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas proses selanjutnya adalah memposting ke Buku Besar.

3. Membuat Neraca Saldo

Setelah dilakukan pemostingan ke Buku Besar, proses selanjutnya adalah membuat Neraca Saldo.

4. Jurnal Penyesuaian

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada akhir periode tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membuat Jurnal Penyesuaian agar nilai dari akun- akun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Berikut adalah salah satu transaksi yang seharusnya dilakukan penyesuaian :

Pemakaian Aset tetap, Aset tetap merupakan kekayaan entitas yang dimasukkan untuk dipakai dalam jangka dengan nilai ekonomis yang relatif besar. Beberapa contoh Aset tetap adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, tanah, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pada saat diperoleh, ia mencatat sebesar harga pokoknya. Selama masa pemakaian, aset tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut dengan penyusutan (depresiasi). Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung biaya penyusutan yaitu antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi, namun yang paling sering digunakan adalah metode garis lurus.

Yang termasuk Aset tetap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Selain gedung dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan aset tersebut kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai penyusutan merupakan pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud dan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

C. Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada dasarnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Dimana pada pasal 232 ayat (6) dijelaskan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal (3) entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Agar semakin jelas, penulis akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. **Laporan Realisasi Anggaran**
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran dalam periode pelaporan. Unsur-unsur yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu instansi pemerintah telah membuat Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. **Neraca**
Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku salah satu SKPD telah membuat Neraca sesuai dengan form dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun dari segi aset Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum mencantumkan nilai asetnya sesuai dengan nilai sesungguhnya, karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum melakukan perhitungan terhadap penyusutan aset tetapnya.
3. **Catatan Atas Laporan Keuangan**
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca). Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibuat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada bagian pendahuluan menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
 - b. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar pelaporan keuangan SKPD yaitu entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - c. Menjelaskan tentang ringkasan laporan yang terdiri dari anggaran belanja dan estimasi pendapatan, realisasi pendapatan dan belanja dan neraca.
 - d. Berisikan tentang penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan dan Belanja.
 - e. Berisikan tentang penjelasan atas pos-pos pada Neraca yang terdiri dari kas dibendahara pengeluaran, kas dibendahara penerimaan, persediaan, aset tetap, investasi jangka panjang, kewajiban, dan ekuitas dana.

Secara keseluruhan isi dari Catatan Atas Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun masih terdapat sedikit perbedaan dalam susunan dari setiap penjelasannya. Namun pada intinya Catatan Atas Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut telah sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan informasi/penjelasan dari setiap laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman oleh setiap pembaca maupun peggungannya.

5. KESIMPULAN

1. Penerapan penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum melakukan pemisahan pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat, melainkan semua transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum.
2. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum membuat jurnal penyesuaian, serta tidak melakukan pempostingan ke Buku Besar.
3. Terhadap seluruh Aset Tetap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga saat ini tidak disusutkan, dalam halnya penyajian pada neraca.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Sepenuhnya dan hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibuat oleh penulis sebelumnya, untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sangat perlu melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang disarankan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Revisi VI), Rineka Cipta. Jakarta.
- Iskandar. 2008. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daaerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riduwan. 2009. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung.